

**PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP NELAYAN
DI KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

M.SANJAYA EKA PUTRA

NIM. 125080200111037



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

**PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP NELAYAN
DI KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :

M.SANJAYA EKA PUTRA

NIM. 125080200111037



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

PRAKTEK KERJA MAGANG**PRAKTEK KERJA MAGANG PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP NELAYAN DI KAWASAN PESISIR KECAMATAN WATULIMO,
KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR**

Oleh:
M.SANJAYA EKA PUTRA
NIM. 125080200111037

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 18 Desember 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Dosen Penguji,



(Ir. Alfian Djauhari, M S)

NIP. 19600401 198701 1 002

Tanggal:

30 DEC 2015



(Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si)

NIP. 19601028 198603 1 005

Tanggal:

30 DEC 2015

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan PSPK



(Oktiyas Muzaky Luthfi, ST, M.Sc)

NIP. 19791031 200801 1 007

Tanggal

30 DEC 2015

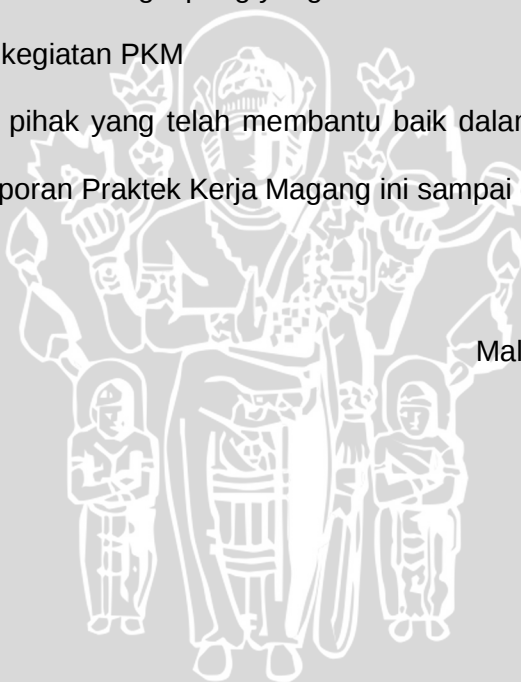
UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1.. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, Material, dll
- 2.. Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungannya
- 3.. Ir. Alfian Jaudhari, MS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing seluruh kegiatan mulai dari pembuatan judul, pembuatan proposal, rekomendasi tempat, sampai dengan penyelesaian laporan PKM ini.
- 4.. Ir. Darmawan Ockto S, MSi selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan bimbingannya.
- 5.. Kacuk Wibisono ST, selaku pembimbing lapang yang telah membimbing dan memberikan nasehat dan arahan selama kegiatan PKM
- 6.. Teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu baik dalam segi moril maupun materiil dalam pengerjaan laporan Praktek Kerja Magang ini sampai dengan selesai.

Malang, Desember 2015

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Kegunaan	3
1.4 Tempat dan Waktu	4
1.5 Jadwal Kegiatan	4
 2. METODOLOGI	
2.1 Metode Pengambilan Data	5
2.2 Teknik Pengambilan	5
2.2.1 Partisipasi Aktif	5
2.2.2 Observasi.....	5
2.2.3 Wawancara.....	6
2.2.4 Dokumentasi.....	7
2.3 Sumber Data.....	7
2.3.1 Data Primer.....	7
2.3.2 Data Sekunder.....	8

3. KONDISIS UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG

3.1 Kondisi Geografis dan Batas Adminitratif.....	9
3.2 Fasilitas Publik.....	10
3.3 Keadaan Umum Masyarakat	12

4. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG

4.1 Perencanaan Pengembangan Nelayan	14
4.1.1 Sosialisai Pengembangan Nelayan	15
4.2 Partisipasi Masyarakat Nelayan.....	17
4.2.1 Pembentukan Anggota Masyarakat Pesisir	18
4.2.2 Verifikasi Anggota KMP.....	20
4.2.3 Pembentukan Rancangan Kelompok Kerja (RKK)	20
4.2.4 Stimulan Program.....	22
4.2.5 Pembelanjaan Stimulan Program.....	22
4.2.6 Tahapan Pembelanjaan Program Stimulan.....	23
4.2.7 Pelatihan Anggota Oleh Tim Teknis.....	24
4.3 Keadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara	26

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran.....	27

DAFTAR PUSTAKA	28
----------------------	----

LAMPIRAN.....	29
---------------	----

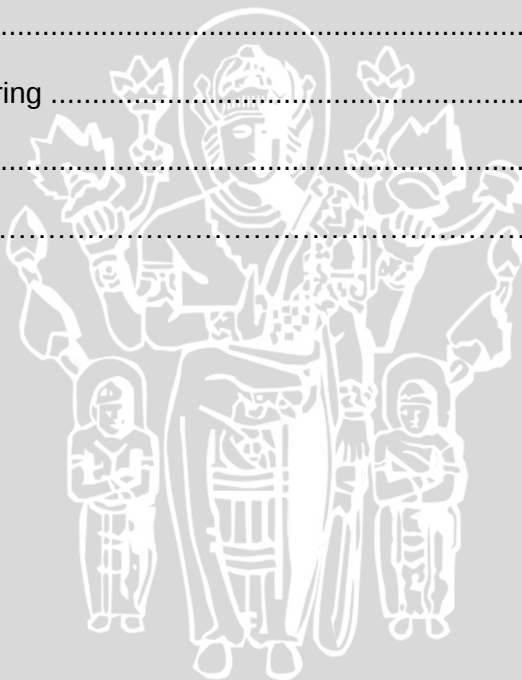
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1. Jadwal Pelaksanaan	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Lokasi PKM	11
2. Sosialisasi	17
3. Partisipasi Masyarakat.....	19
4. Pembentukan Anggots KMP	20
5. Pengerjaan RKK.....	22
6. Pelatihan	24
7. Lokasi PPN Prigi.....	28
8. Blankwater.....	28
9. Tempat Penjemuran Jaring	28
10. Aktifitas Nelayan	29
11. Hasil Tanggapan.....	29



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan non-hayati, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut. (KEP.10/MEN/2002)

Sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk. Sumberdaya pesisir tersebut mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam serta dapat dimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relatif murah sehingga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif. Di sisi lain, kebutuhan pasar masih terbuka sangat besar karena kecenderungan permintaan pasar global yang terus meningkat.

Kecamatan Watulimo terletak di kabupaten Trenggalek Jawa Timur sebelah selatan tepatnya sebelah barat berbatasan dengan kecamatan munjungan dan kampak, sebelah utara kecamatan kampak dan gendusari, sebelah timur kabupaten Tulungagung dan sebelah selatan Samudera Hindia. Dengan hasil perikanan yang di peroleh mulai dari ikan tuna, tengiri, teropong, cumi-cumi, dll. Dengan besarnya potensi perikanan yang ada di kecamatan Watulimo mengakibatkan aktivitas perdagangan meningkat seiring meningkatnya hasil tangkapan ikan (Aswanah *et al*, 2013).

Menurut Pradana (2012), Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan memanfaatkan secara berimbang dan selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang terencana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Tujuan pokok ini adalah berupa terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Siagian (1997) dalam Safi'i (2009), pembangunan adalah suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya, menuju suatu pembinaan bangsa (*nation building*). Sasaran utama yang ingin dicapai dari suatu pembangunan adalah meningkatnya pendapatan yang selanjutnya didukung oleh pemerataan pendapatan. Adanya pemerataan ini diharapkan bahwa hasil dari pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan tersebar secara merata ke wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga kesenjangan antar wilayah pun dapat diminimalkan. Berdasarkan pada tinjauan ilmu geografi, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan yang unik. Keunikan antar wilayah inilah yang kemudian menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka mendorong kemajuan wilayah. Keunikan inilah yang menjadikan masing-masing wilayah memiliki orientasi pembangunan yang berbeda-beda. Seperti misalnya pada wilayah pesisir, maka orientasi pengembangan wilayahnya adalah pada sektor kelautan.

Praktek Kerja Magang ini akan dilaksanakan di Desa Tasikmadu, Desa Prigi, Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dalam magang ini penulis membantu dalam kegiatan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pesisir dan partisipasi aktif dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan program tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan Praktek Kerja Magang (PKM) adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terkait perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir, serta bersosialisasi dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama melaksanakan perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari praktek kerja magang ini adalah untuk memahami :

1. Mengetahui Keadaan Umum Wilayah Pesisir Kecamatan Watulimo
2. Mengetahui proses perencanaan pengembangan kawasan pesisir tangguh
3. Mengetahui partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh di desa Tasikmadu, Desa Prigi, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo
4. Mengetahui keadaan umum Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

1.3 Kegunaan

Dengan dilakukannya praktek kerja magang ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Lembaga Akademis (Perguruan Tinggi dan Mahasiswa)

Sebagai sarana informasi dan untuk menambah pengetahuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh

2. Lembaga atau Instansi terkait

Memberikan informasi mengenai kondisi dan potensi wilayah Desa Watulimo yang meliputi Desa Tasikmadu, Desa Prigi, Desa Karanggandu

3. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pembuatan kebijakan yang terkait dengan perikanan tangkap dan kawasan pesisir tangguh yang ada di Indonesia

1.4 Waktu dan Tempat

Praktek Kerja Magang ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2015 di kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang 2015.

No	Kegiatan	Bulan Ke-									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pengajuan Judul				√						
2.	Penyusunan Proposal				√	√					
3.	Perizinan Tempat				√						
4.	Pelaksanaan Magang							√	√		
5.	Analisis Data							√	√	√	
6.	Penyusunan Laporan								√	√	

2. METODOLOGI

2.1 Metode Pengambilan Data

Pengambilan data pada PKM ini dilakukan secara langsung (data primer) dan tidak langsung (data sekunder). Pengambilan data secara langsung dilakukan dengan partisipasi aktif, observasi secara langsung di lapangan, wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, tenaga pendamping dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan serta dokumentasi. Pengambilan data secara tidak langsung diperoleh dari buku, jurnal, internet dan data yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data letak geografis dan keadaan topografi desa, keadaan penduduk setempat, struktur desa serta sarana dan prasana.

2.2 Teknik Pengambilan Data

2.2.1 Partisipasi Aktif

Nazir (2005), mengatakan bahwa partisipasi aktif adalah penelitian mengandalkan pengamatan untuk mengetahui siapa yang berperan aktif dan bagaimana hubungan orang yang berperan aktif satu dengan lainnya.

Partisipasi aktif pada PKM ini dilakukan dengan mengikuti secara langsung perencanaan dan pelaksanaan program. Kegiatan perencanaan meliputi pembuatan kelengkapan administrasi, pembuatan kelompok, rencana pembuatan sarana dan prasarana, dan pembuatan proposal untuk program selanjutnya. Pelaksanaan program meliputi kegiatan sosialisasi, rapat, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan tenaga pendamping kepada kelompok masyarakat pesisir.

2.2.2 Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk

evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Rahmat, 2012).

Observasi pada PKM ini dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, keadaan umum, keadaan penduduk dan sarana prasara yang berada disekitar Desa Tasikmadu, Desa Prigi, Desa Karanggandu.

2.2.3 Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Rahmat, 2012).

Wawancara dilakukan untuk lebih memperjelas pengambilan data. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Untuk wawancara terprogram peneliti telah menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan (Subandi, 2011).

Wawancara pada PKM ini dilakukan pada masyarakat, pendamping kelompok masyarakat pesisir, dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Wawancara ini dilakukan dengan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh di Desa Tasikmadu dan sekitarnya. Data yang diperoleh dari wawancara meliputi tentang rencana program, manfaat dari program, kendala yang dihadapi pada saat perencanaan dan pelaksanaan program, sejarah umum dari Desa Tasikmadu serta sarana dan prasarana yang berada di Desa Tasikmadu.

2.2.4 Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam mengalisis data penelitian (Subandi, 2011).

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam (Rahmat, 2012).

Dalam PKM ini dokumentasi akan meliputi data yang diperoleh pada saat melakukan perencanaan dan pelaksanaan program, data terkait keadaan umum disekitar Kecamatan Watulimo, serta dokumentasi sarana dan prasarana yang ada.

2.3 Sumber Data

2.3.1 Data Primer

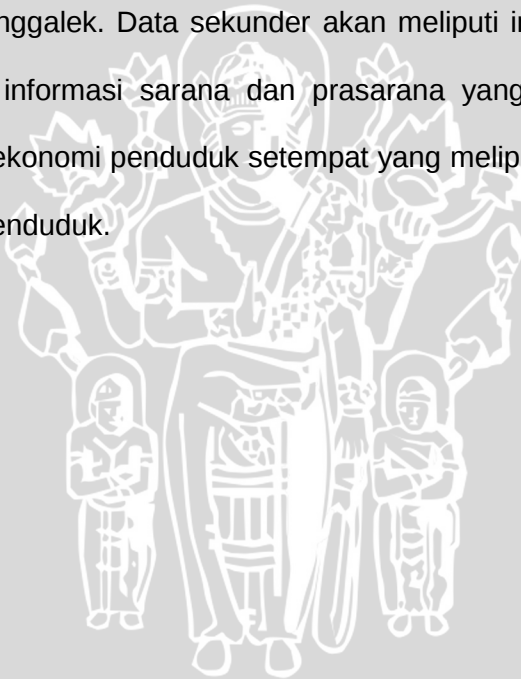
Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data ini tidak tersedia karena memang belum ada riset sejenis yang pernah dilakukan atau hasil riset sejenis yang sudah terlalu kadaluwarsa. Jadi, peneliti perlu melakukan atau pengadaan data sendiri karena tidak bisa mengandalkan data dari sumber lain. Karena data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dibandingkan perolehan data sekunder (Istijanto, 2005).

Data primer merupakan data yang diperoleh pada saat kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program yang meliputi pembuatan kelompok masyarakat pesisir, rencana pembuatan sarana dan prasarana, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan. Data primer didapatkan secara langsung dan paling baru yang diperoleh pada saat PKM. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung, wawancara, partisipasi aktif dan dokumentasi.

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan peneliti sendiri, untuk tujuan lain. Ini mengandung arti bahwa peneliti sekedar mencatat, mengakses atau meminta data tersebut pada pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya. Keberadaan data sekunder tidak dipengaruhi oleh riset yang akan dijalankan oleh peneliti (Istijanto, 2005).

Data sekunder dalam PKM ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada untuk menunjang segala informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh di kawasan pesisir Watulimo. Data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal, laporan, serta data yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Data sekunder akan meliputi informasi lokasi Desa Tasikmadu secara geografis, informasi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Watulimo, serta kondisi sosial ekonomi penduduk setempat yang meliputi mata pencaharian penduduk dan sosial budaya penduduk.



III. KEADAAN UMUM

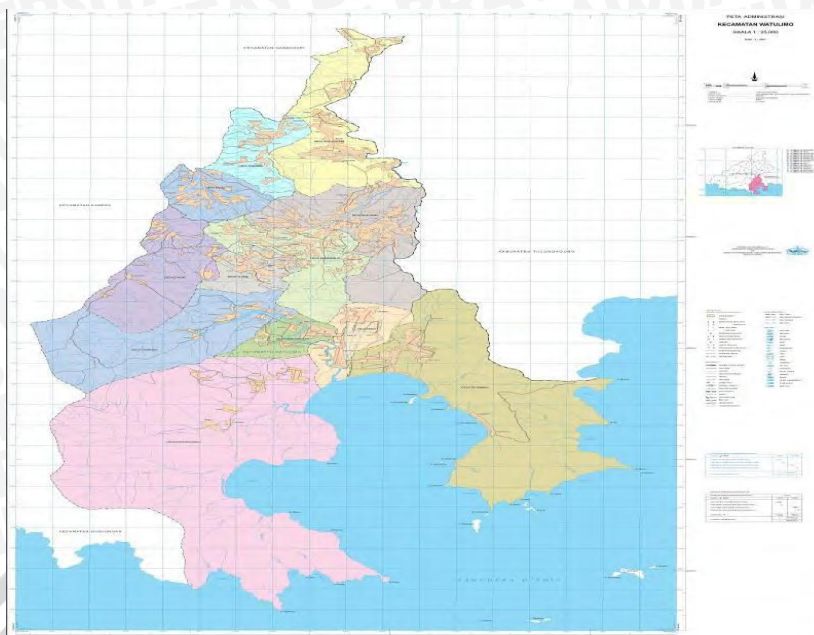
3.1 Letak Geografis dan Batas Administratif Kecamatan Watulimo

Kecamatan Watulimo adalah bagian dari Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 154,44 km² persentase terhadap luas Kabupaten 12,24 %, jarak dari ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Trenggalek 44 km. Letak geografis Bujur Timur 1110 38' 41" - 1110 46' 41", Lintang Selatan 80 8' 31" - 80 23' 01". Batas Kecamatan Watulimo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Gandusari;
- Sebelah Timur laut berbatasan dengan Kec. Besuki Kab. Tulungagung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Besuki Kab. Tulungagung;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat daya berbatasan dengan Kec. Munjungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Munjungan, Kec. Kampak;
- Sebelah Barat laut berbatasan dengan Kec. Gandusari, Kec. Kampak;

Keadaan geologi kecamatan Watulimo bagian utara jenis tanah daratan, bagian timur jenis tanah pegunungan, bagian selatan adalah lautan dan bagian barat jenis tanah pegunungan. Jarak kecamatan watulimo ke kabupaten dan/ kota 44 km dan jarak desa ke ibu kota provinsi adalah 195 km.

Topografi Kecamatan Watulimo yang dimanfaatkan masyarakat untuk bermukim yaitu dataran rendah dan perbukitan kapur. Masyarakat yang memiliki tempat tinggal di dataran rendah menggunakan air PAM, sumur gali dan embung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk masyarakat daerah perbukitan mendapatkan air dengan memanfaatkan sumber mata air dari pegunungan.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Watulimo

3.2 Fasilitas Publik

Fasilitas publik merupakan penunjang kegiatan pengembangan investasi pada suatu wilayah. Fasilitas yang terdapat di desa pesisir merupakan penunjang pengembangan perikanan, pariwisata dan perekonomian lainnya. Kecamatan Watulimo merupakan kecamatan yang dilewati jalan lintas selatan (JLS) yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jalan lintas selatan nantinya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka keterisolasian kawasan pesisir selatan. Dengan adanya jalan lintas selatan juga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa-desa pesisir dan desa – desa koordinatif yang ada di kabupaten Trenggalek.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi merupakan fasilitas utama bagi sektor perikanan yang terletak di Kecamatan Watulimo. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai beberapa fasilitas diantaranya : Tempat pelelangan ikan, jembatan jetti, cold storage, kolam pelabuhan, kantor pelabuhan, ruang pertemuan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan dan pabrik es. Sarana pelabuhan ini menjadi pengungkit perekonomian masyarakat yang ada di kawasan Teluk Prigi. Selain pelabuhan juga terdapat balai benih

udang galah (*BBUG/UPPG*) yang berfungsi sebagai penyediaan benih udang galah di Jawa Timur.

Kecamatan Watulimo yang berjarak sekitar 44,0 Km dari Kota Trenggalek yang dihubungkan dengan sarana jalan yang cukup baik. Wilayah pesisir Watulimo mempunyai 3 (*tiga*) desa yang telah memperoleh jaringan listrik dan PDAM. Fasilitas pendidikan tersedia cukup lengkap mulai play group, tingkat SD sampai SMA dan SMKN Kelautan. Fasilitas kesehatan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan tersedia prasarana kesehatan tersedia unit, Rmah Sakit Puskesmas Pembantu, toko obat, 1 unit Poskesdes, 11 Posyandu dan 2 rumah bersalin.

Sarana transportasi untuk mencapai wilayah pesisir Watulimo cukup baik dan telah dilalui angkutan reguler selama 14 jam sehari. Selain sarana jalan dan transportasi, pesisir Watulimo juga terdapat fasilitas telekomunikasi berupa Satuan Telepon Otomatis (STO), jaringan telepon seluler baik GSM maupun CDMA yang sudah menjangkau semua wilayah pesisir, sehingga komunikasi melalui telepon biasa dan seluler sudah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini digarapkan dapat mendukung minat para investor yang akan menanamkan investasinya di wilayah pesisir. Jaringan listrik yang tersedia saat ini mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa dan industri perikanan walaupun terkadang masih padam tiba-tiba karena pengaruh kondisi jaringan yang melalui perbukitan dan pepohonan ketika musim angin / hujan lebat

Kawasan Pesisir Watulimo mempunyai fasilitas perdagangan, perbankan , lembaga – lembaga keuangan dan hotel sebagai penyokong sektor perekonomian dan pariwisata. Berdasarkan data profil Desa Tasikmadu 2014, fasilitas perdagangan dan perbankan yang tersedia antara lain: satu fasilitas perbankan, 6 fasilitas perkreditan rakyat, 2 minimarket, 338 warung, 259 kios, 12 toko, 4 losmen dan 2 hotel. Semua fasilitas tersebut mampu mengerakkan perekonomian dan sektor riil masyarakat sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tasikmadu cukup baik.

Mengingat sifat kegiatan ekonomi nelayan di Kawasan Pesisir Watulimo bersifat musiman maka pada saat – saat tidak musim ikan (*laib/paceklik*) selain diarahkan pada

pertanian / ladang / kebun, untuk mengisi kegiatan ekonomi alternatif masyarakat desa sangatlah cocok jikalau diarahkan pada kegiatan – kegiatan seperti ternak kambing, kerajinan batu alam, industri kreatif penopang pariwisata dan industri pengolahan hasil perikanan lainnya. Hal ini ditopang oleh ketersediaan bahan baku yang masih melimpah di kawasan pesisir Watulimo dan selama ini belum di manfaatkan secara maksimal.

3.3 Keadaan Umum Masyarakat

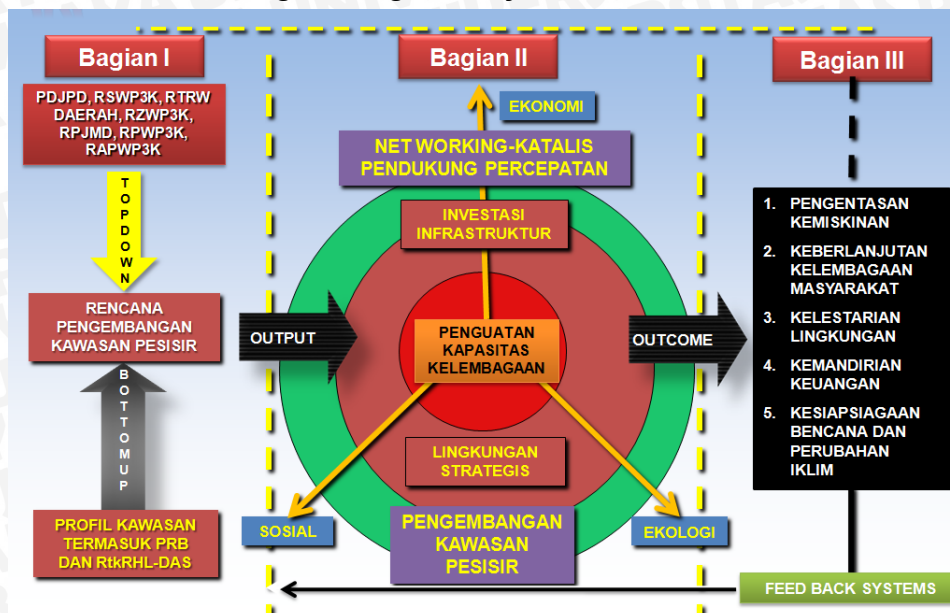
Secara umum tatanan kehidupan masyarakat pesisir Watulimo berjalan cukup baik, dimana hubungan horizontal antara penduduk asli dan pendatang berkembang dan berjalan dengan baik. Masyarakat pesisir watulimo sebagian besar memeluk agama Islam, dimana ketaatan mereka terhadap ajaran agama sangat tinggi. Masyarakat pesisir Watulimo masih menjunjung adat istiadat Jawa, dalam kegiatan kemasyarakatan sehari – hari dan pada saat tertentu masih menggunakan mengadakan upacara adat (upacara adat / selamatan mendirikan rumah, upacara adat labuh laut dsb.).

Kerukunan antar masyarakat juga berjalan dengan baik. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani mendominasi tatanan sosial masyarakat, interaksi antara nelayan andon (*boro kerja*) dengan masyarakat setempat terjalin cukup baik bahkan terjalin hubungan yang saling menguntungkan diantara mereka. Pola kehidupan dan kebersamaan antar masyarakat merupakan potensi untuk menggerakkan perekonomian dan sektor pariwisata yang terdapat di Kecamatan Watulimo khususnya dan Kabupaten Trenggalek umumnya

Penduduk peisir Watulimo mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, pedagang dan jasa orang dan bekerja disektor industry. Sektor perikanan dan pertanian merupakan sector penting dan menjadi tulang punggung perekonomian. Sektor perikanan menjadi motor penggerak utama (*urat nadi*) perekonomian masyarakat pesisir Watulimo yang didukung oleh fasilitas dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Prigi). Selain fasilitas pelabuhan juga terdapat KUD Mina, SPBU AKR, Perum Prasarana Perikanan Samudera, tempat pelelangan ikan (*TPI*), cold storage, pabrik tepung ikan dan fasilitas lain sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

IV. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG (PKM)

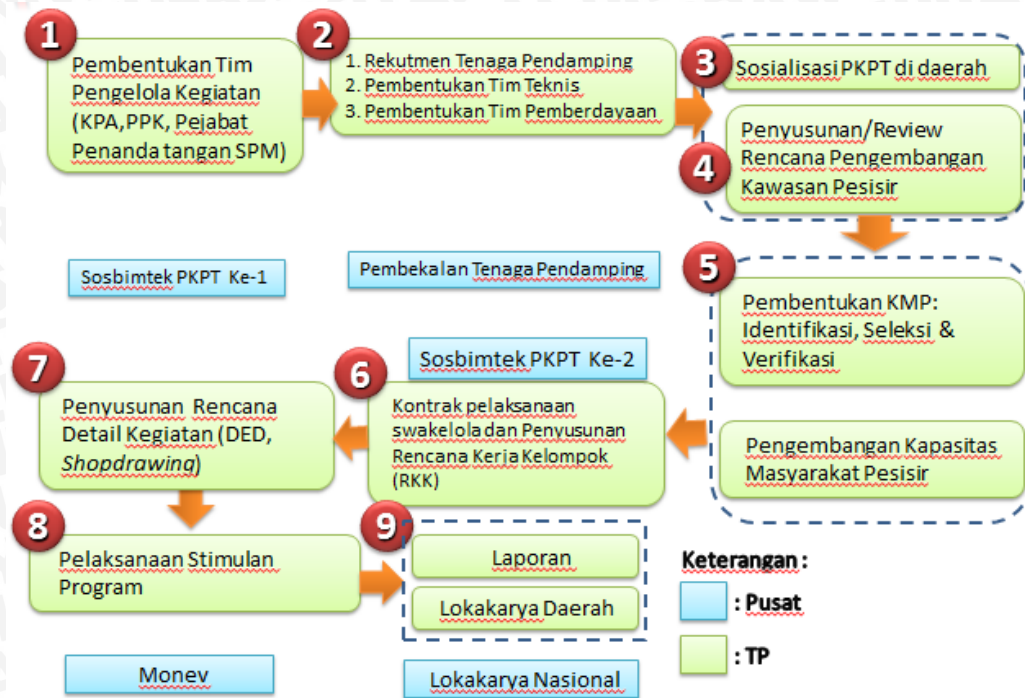
4.1 Perencanaan Pengembangan Masyarakat Pesisir



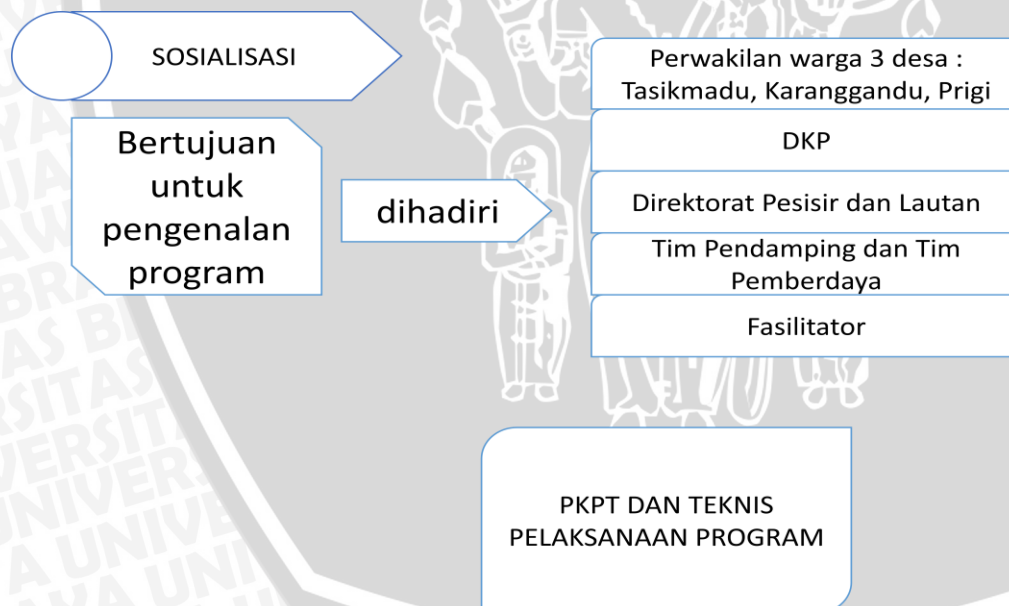
Perencanaan pengembangan masyarakat pesisir merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat kawasan pesisir dimana partisipasi masyarakat pesisir sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dan keberlanjutannya dalam kegiatan ini nama program yang digunakan adalah Program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan. Pengetahuan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim masih rendah. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat pesisir. Kegiatan ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan daerah mereka dengan melibatkan peran serta perempuan.

Dalam pengembangan masyarakat pesisir ini terdapat susunan perencanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan ini terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, mulai dari sosialisasi, penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP), pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK), dan pencairan dana.



4.1.1 Sosialisasi Pengembangan Nelayan



Pada pelaksanaan sosialisasi tujuannya untuk mensosialisasikan program ini pada seluruh *stakeholder* yang melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat, Perangkat Desa, Penyuluh, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pemberdaya. Program pengembangan masyarakat pesisir dibuat sasarannya untuk masyarakat pesisir

yang terdiri laki-laki dan perempuan. Masyarakat menjalankan program ini secara partisipasi aktif dengan melibatkan peran serta perempuan sedangkan perangkat desa dan pihak DKP hanya sebagai fasilitator. Kegiatan ini dilakukan selama 3 tahun pada kawasan yang sama, yang diharapkan akan menjadi keterpaduan. Bila pada tahun pertama berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Ini merupakan stimulan atau pancingan agar masyarakat pesisir dapat berkembang secara bertahap dan mandiri.

Program pengembangan masyarakat pesisir difokuskan pada bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, bina sumberdaya, bina siaga bencana dan perubahan iklim. Dari bina manusia diharapkan mampu memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat. Bina usaha diharapkan masyarakat dapat meningkatkan ketrampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternative, dan pengelolaan bisnis usaha kecil. Bina lingkungan dan infrastruktur dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan, melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran, dan membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih). Bina siaga bencana dan perubahan iklim dengan cara melakukan usaha-usaha pengurangan resiko bencana, memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana, dan membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana seperti jalur evakuasi. Bina sumberdaya dengan memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya, merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya habitat.

Wilayah Trenggalek dipilih untuk pelaksanaan program pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi yang dipilih mencakup 3 desa, yaitu Tasikmadu, Karanggandu dan Prigi yang ada di Kecamatan Watulimo. Lokasi ini dipilih karena memiliki kriteria lokasi yang rawan bencana dan perubahan iklim, terjadi degradasi lingkungan pesisir, dan mempunyai potensi ekonomi lokal yang unggul.

Tolak ukur keberhasilan program pengembangan masyarakat pesisir adalah diadakannya lembaga seperti koperasi, BUMDES, dan kelompok msyarakat siaga bencana. Program ini hasilnya ada yang bisa diuangkan sehingga dapat digunakan untuk mendirikan

lembaga-lembaga tersebut. Hal ini nantinya dapat dilihat dari semangat gotong royong dan swadaya masyarakat pesisir baik dari segi tenaga, materi dan lainnya.



Gambar.2. Sosialisasi Pengembangan Nelayan

4.2 Partisipasi Masyarakat Nelayan

Pada tahun pertama kegiatan dititikberatkan pada penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP). RPKP akan dijadikan dokumen utama yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan masyarakat pesisir untuk tahun berikutnya. RPKP dibuat mengacu pada profil kawasan dan rencana masyarakat berdasarkan masukan masyarakat melalui partisipasi dan diskusi kelompok terfokus.

Dokumen RPKP akan digunakan sebagai referensi untuk penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan ekologi yang dijabarkan dalam 5 fokus pengembangan kegiatan, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Sumberdaya, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, dan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim.

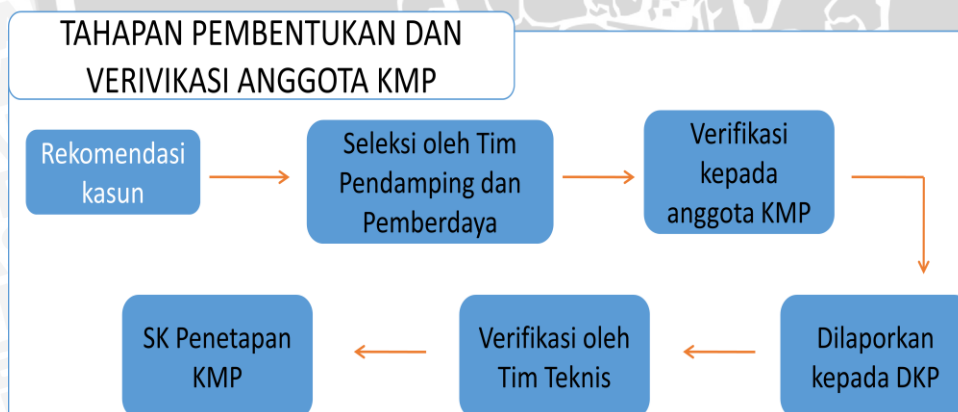
Penyusunan RPKP meliputi visi dan misi desa, gambaran umum wilayah, potensi dan masalah desa, metode penyusunan RPKP (perencanaan, fokus, pendekatan), keterkaitan dengan rencana lain, dan rencana pengembangan kawasan melalui 5 bina yang terfokus. RPKP diberi lampiran yang meliputi daftar potensi dan masalah desa, penentuan tingkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan perencanaan pengembangan kawasan pesisir tangguh.

Dokumen RPKP dapat menjadi masukan dan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des). RPKP dikirim ke Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk dilakukan pengecekan. Pada saat pengecekan terdapat ketidaksesuaian antara RPKP dengan RPJM Des sehingga perlu 1 kali revisi.



Gambar 3.Partisipasi Masyarakat dalam proses penetapan KMP

4.2.1 Pembentukan Anggota Kelompok Kawasan Pesisir (KMP)



Calon penerima Stimulan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) adalah Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pengurus dan anggota bukan perangkat desa/kelurahan, PNS, TNI/Polri, dan PKPTK
2. Pengurus dan anggota berdomisili di desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP, kartu Keluarga, atau surat keterangan berdomisili dari kepala desa/lurah, dan

3. Penanggungjawab KMP dan tim swakelola berjumlah sekurang-kurangnya 4 dan maksimal 7 orang

Tahapan pengusulan calon penerima Stimulan Program PKPT dilakukan secara berjenjang melalui tahapan seperti dibawah ini:

- Tim Pemberdayaan dan Tenaga Pendamping, bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kinerja penerima Stimulan Program lama, dan/atau melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima Stimulan Program PKPT baru;
- Hasil evaluasi kinerja penerima Stimulan Program lama dan/atau identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima Stimulan Program PKPT baru selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan peninjauan kembali hasil evaluasi kinerja penerima Stimulan Program lama dan/atau identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima Stimulan Program PKPT baru untuk kemudian menetapkan KMP dimaksud setelah mendapatkan verifikasi ulang dari Tim Teknis; dan
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Keputusan Penetapan Penerima Stimulan Program PKPT kepada Dirjen KP3K dan ditembuskan kepada Direktur Pesisir dan Lautan, serta kepada Kepala Dinas Provinsi.

Struktur organisasi KMP terdiri dari:

1. Penanggungjawab KMP;
2. Tim Swakelola yang terdiri dari:
 - a. Tim Perencana;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.



Gambar 4. Pembentukan anggota KMP

4.2.2 Verifikasi Anggota KMP

Setelah dilakukan penetapan anggota KMP tahap selanjutnya meverifikasi anggota KMP yang bertempat di kantor desa Prigi, desa Karanggandu, Desa Tasikmadu. Verifikasi ini bertujuan untuk mencocokkan nama anggota KMP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap Anggota KMP harus menyerahkan fotocopy KTP untuk mengetahui profesi dari anggota KMP.

4.2.3 Pembuatan Rancangan Kerja Kelompok (RKK)

RKK disusun oleh Tim Perencana KMP dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping dan Tim Pemberdayaan. Tim Perencana KMP menyusun RKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir, sesuai dengan Lampiran II Formulir 9.

Verifikasi RKK dilakukan oleh Tim Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal RKK ditandatangani oleh Penanggungjawab KMP dan dilengkapi dengan SK Penetapan KMP. Proposal tersebut diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi;
2. Hasil verifikasi RKK dituangkan dalam Berita Acara, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas selaku KPA untuk proses penetapan; dan

3. Proposal RKK yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab KMP untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Pelaksanaan penyusunan RKK pada kegiatan PKPT yang merupakan kerangka acuan kerja (KAK) bagi KMP dilakukan oleh masing-masing KMP, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3. Keperluan bahan dan peralatan/ suku cadang;
4. Rincian biaya pekerjaan;
5. *Output* yang dihasilkan; dan
6. Gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis

Pembuatan RKK ini sempat terjadi beberapa revisi untuk mencocokkan dengan pedoman teknis, kesalahan dalam membuat RKK meliputi kesalahan tanda tangan kepala desa beserta desa pada pedoman teknis tanda tangan tersebut harus di isi oleh ketua tim pemberdaya yaitu kepala desa tanpa mencatumkan stempel desa. Dalam pembuatan RKK ini juga mencantumkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam pembuatan RAB ada kesalahan dalam mencantumkan PPH yang seharusnya PPN dana yang terkena pajak yaitu dana yang terpakai dari keseluruhan dana stimulan. Dalam RKK juga harus dicantumkan struktur, tugas, dan kewajiban anggota KMP



Gambar 5. Proses pengerjaan RKK dengan Pendamping

4.2.4 Stimulan Program

Stimulan Program PKPT terdiri atas komponen:

1. Penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana atau perubahan iklim;
2. Peningkatan dan/atau perbaikan ekosistem pesisir;
3. Pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur; dan
4. Penyediaan sarana kegiatan usaha sekunder.

4.3.5 Pembelanjaan Stimulan Program

Pembelanjaan Stimulan Program PKPT dilakukan melalui tahapan:

1. KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses pembelanjaan Stimulan Program kepada KMP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran :
 - a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan KMP penerima Stimulan Program
 - b. Data KMP meliputi:
 - 1) nama penanggungjawab ;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara;
 - 4) anggota;
 - 5) nomor telepon/telepon genggam
 - 6) umur;
 - 7) jenis kelamin;
 - 8) alamat;
 - 9) KTP;

10) Kartu Keluarga; dan

11) Surat Keterangan Domisili dari Camat.

- c. Hasil Identifikasi KMP Penerima Stimulan Program PKPT;
 - d. Hasil Seleksi KMP Penerima Stimulan Program PKPT;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi KMP Penerima Stimulan Program PKPT
 - f. Kuitansi yang sudah ditandatangani Penanggungjawab KMP dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); dan
 - g. Surat Perjanjian Kesepakatan antara KPA dengan KMP yang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Ketentuan mengenai penggunaan meterai tempel yang baru di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai (Lampiran X).
3. KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan Stimulan Program kepada Dinas Kabupaten/Kota; dan
 4. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil pembelanjaan Stimulan Program PKPT kepada Dirjen KP3K dengan tembusan kepada Direktur Pesisir dan Lautan, serta Kepala Dinas Provinsi.

4.2.6 Tahapan Pembelanjaan Program Stimulan

Ketentuan penyaluran dana stimulan program mengikuti ketentuan yang ditetapkan pada Lampiran VI Tata Cara Swakelola, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan penyaluran stimulus program dari Bendahara Satker Dinas Kelautan dan Perikanan kepada KMP mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan kegiatan swakelola. Ketentuan ini dipenuhi dengan melampirkan:

- Kelengkapan tim swakelola yang tercantum dalam SK penetapan KMP yang disahkan oleh KPA Satker Dinas Kelautan dan Perikanan (Lampiran II Formulir 8)
- Dokumen RKK
- Berita Acara Hasil Verifikasi RKK dan Dokumen Administrasi Pendukung
- Berita Acara Perubahan RKK (kalau ada)

2. Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus).

- Berita acara kemajuan pekerjaan
- Dokumentasi

3. Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

- Berita acara kemajuan pekerjaan
- Dokumentasi

Sebelum pembelanjaan dana stimulant ini pendamping harus mensurvey harga alat dan bahan dari 3 toko selanjutnya di tulis dalam form dan memiliki harga yang paling murah dari 3 toko tersebut, setiap form survey harga harus ditanda tangani oleh tim perencana dari setiap KMP.

4.2.7 Pelatihan Anggota KMP Oleh Tim Teknis

Pelatihan ini dilakukan oleh tim teknis yang di datangi oleh Ir.Sukandar, MP dan DKP Kabupaten Trenggalek, pelatihan ini dimaksudkan agar memberikan bayangan atau informasi pengetahuan tentang Program Pengembangan Pesisir Tangguh dana pa yang akan dihadapi oleh masyarakat pesisir yang meliputi potensi bencana Tsunami, Perubahan iklim, dan bagaimana mencari matah pencaharian sampingan guna mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu juga tim teknis memberikan arahan bagaimana program ini dapat dijalankan dengan teliti dan benar, pendamping juga harus mendampingi KMP saat pelaksanaan



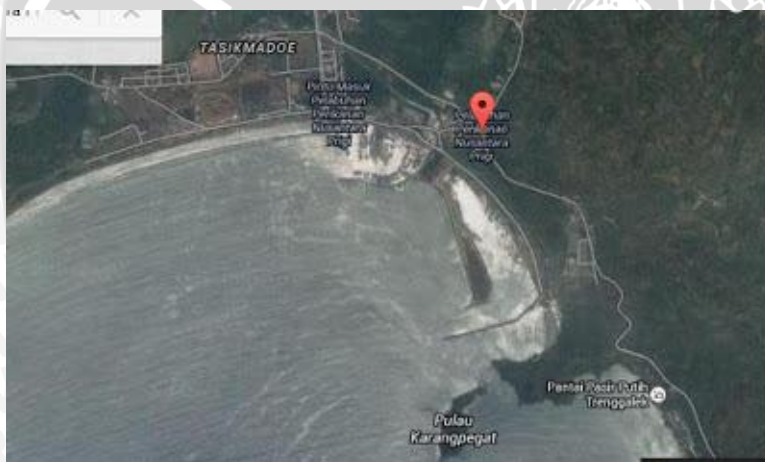
Gambar 6. Pelatihan kepada masyarakat anggota KMP

4.3 Keadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara

PPN Prigi adalah salah satu pelabuhan perikanan di Jawa Timur yang terletak di wilayah selatan. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek Kab. Trenggalek Jawa Timur. Jenis armada penangkap ikan yang beroperasi di PPN Prigi didominasi oleh perahu motor tempel 30-50 GT. Jenis alat tangkap yang beroperasi di PPN Prigi adalah : payang, pukot cincin, pukot pantai, jaring insang hanyut, jaring klitik, pancing ulur, pancing tonda dan trammel net.

Jenis ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi adalah : Manyung, Ekor kuning, Selar, Kuwe, Layang, Bawal Putih, Teri, Layaran, Kurisi, Tongkol, Kembung, Cakalang, Tenggiri, Madidihang, Kerapu, Layur, Cumi cumi dan Pari. Ikan hasil tangkapan dipasarkan di wilayahnya sendiri sampai ekspor. Ikan hasil tangkapan dipasarkan antara lain ke Nganjuk, Malang, Jombang, Tulung Agung, Surakarta, Tegal dan Jogjakarta. Ekspor dilakukan ke Cina. Jenis ikan yang diekspor adalah ikan Layur.

Jasa pelayanan di PPN Prigi antara lain adalah pelelangan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, pengisian BBM, perbaikan kapal, tambat dan labuh kapal dan pengisian perbekalan untuk operasi penangkapan. Dalam hal pelayanan pengolahan ikan, di PPN Prigi tersedia tempat pengolahan ikan, pengendalian kualitas ikan dan produk ikan, penyimpanan ikan, pengangkutan ikan, laboratorium riset dan pengepakan ikan. Pelayanan bagi masyarakat umum, tersedia koperasi, wisata bahari, penyewaan area lahan pelabuhan, penyediaan sarana penangkapan dan pembinaan nelayan/keluarga nelayan. Pihak pelabuhan juga menyediakan sarana keselamatan pelayaran, keamanan, pengawasan perikanan dan pendataan hasil tangkapan. Beberapa jenis kegiatan kelembagaan yang dilakukan di PPN Prigi antara lain : adanya asosiasi nelayan, kelompok usaha bersama, koperasi nelayan dan lembaga keuangan mikro.



Gambar 7. Lokasi PPN Prigi



Gambar 8. Blankwater



Gambar 9. Tempat penjemuran jaring



Gambar 10. Aktivitas bongkar muat nelayan Pancing Tonda



Gambar 11. Hasil Tangkapan nelayan Pancing Tonda



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam proses perencanaan dan pengembangan yang dilaksanakan di Kawasan Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang memiliki beberapa alur yakni: mulai dari sosialisasi, penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP), pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK), dan pencairan dana.
2. Dalam prosesnya pengembangan dan perencanaan terdiri dari pembangunan dan perbaikan jalan sebagai akses desa yang menyokong perekonomian masyarakat nelayan di pesisir Kecamatan Watulimo serta diadakannya perbaikan fasilitas untuk nelayan yang bersandar untuk mendaratkan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Prigi agar lebih efektif dan lebih efisien
3. Dari serangkain proses perencanaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang sektor perikanan, dapat diketahui bahwa partisipasi dari masyarakat nelayan di kawasan pesisir Watulimo cukup baik sehingga semua prosesnya dapat dikatakan berjalan dengan lancar.

5.2 Saran

Perlu adanya kematangan dalam koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam prosesnya terjadi suatu keterpaduan dan keselarasan yang mampu menjadikan program ini lebih diterima di masyarakat.

Perlu adanya kordinasi antar stekholder yang bertanggung jawab di kawasan pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek agar kebijakan – kebijakn antarstekholder tidaksaling tumpang tindih

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal.50, 175, 177.
- Ahdiat, K. M., 2010. *Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap dan Wisata Bahari Secara Terpadu Berbasis di PPI Jayanti Kabupaten Cianjur*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Profil Desa Tasik Madu Kabupaten Trenggalek. 2014. *Profil Desa Tasik Madu*. Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Rahmat, P. S., 2012. *Jurnal Penelitian Kualitatif*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Rahmawati, M., A. D. Purnama Fitri dan D. Wijayanto. 2013. *Analisis Hasil Tangkapan Per Upaya Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Ikan Teri (Stolephorus Spp.) di Perairan Pemalang*. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Vol. 2 (3): 214.
- Subandi. 2011. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Institut Seni Indonesia Surakarta: Surakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Praktek Kerja Magang

**BUKU CATATAN HARIAN (LOG BOOK)
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA MAGANG (PKM)**

Judul : Peningkatan Kualitas Hidup Nelayan di Kawasan Pesisir
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa
Timur

Nama : M.Sanjaya Eka Putra

Nim : 125080200111037

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KETERANGAN PKM

Judul PKM : Peningkatan Kualitas Hidup Nelayan di Kawasan Pesisir

Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa

Timur

Nama Mahasiswa : M.Sanjaya Eka Putra

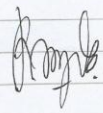
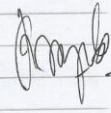
NIM : 125080200111037

Bidang Studi : PSP

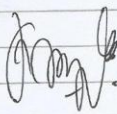
Tahun Pelaksanaan : 2015

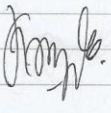
Tujuan PKM :

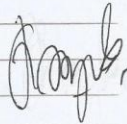
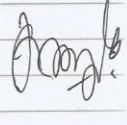
1. Untuk mengetahui keadaan umum wilayah pesisir kecamatan Watulimo
2. Untuk mengetahui proses perencanaan pengembangan kawasan pesisir tangguh
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tangguh di desa Tasikmadu, desa Prigi, desa Karanggandu. Kecamatan Watulimo
4. Mengetahui keadaan umum pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

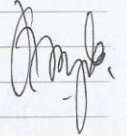
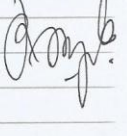
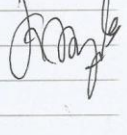
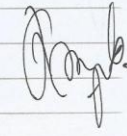
Tanggal No Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Sebra
27/15 05	Sosialisasi pengembangan kawasan Pesisir Tangguh di Trenggalek yang bertempat di aula PPM Prigi di hadiri oleh perwakilan Dirjen Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil, DKP Trenggalek kepala desa, pendamping dan calon anggota kmp	- Program PKPT ini dibuat untuk mengembangkan kawasan yang membentuk masyarakat pesisir yang mandiri - Program PKPT dibuat Sasaran nya untuk masyarakat pesisir yang terdiri dari laki-laki dan perempuan - Program PKPT ini merupakan Stimulan atau pancingan, bila di tahun pertama dapat berjalan dengan baik maka akan ber jalan selama 3 tahun - Program PKPT dijalankan oleh masyarakat pesisir secara partisipasi aktif, Sedangkan perangkat desa dan DKP hanya fasilitator - Fokus PKPT adalah bina manus la, bina usaha, bina Sumberdaya bina lingkungan dan infrastruktur bina siaga bencana dan peruba han iklim, dan bina kelembag aian - Program PKPT ini mencakup 3 desa yang berada di kecamatan Watulimo desa-desa tersebut antara lain desa Prigi, desa Karang gandu, desa Tasikmadu	
2 30/15 06	Verifikasi kelompok Masyarakat Pesisir (kmp) kecamatan Watulimo yang meliputi Desa Prigi, Desa Karang gandu, Desa Tasikmadu	- Verifikasi ini bertujuan untuk men Verifikasi atau mencocokkan nama anggota kmp karena syarat anggota kmp adalah bukan dari petang kat desa TNI, POLRI, PNS. - Verifikasi kmp bertempat di masing-masing kantor desa yang	

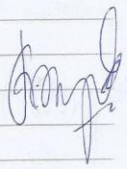
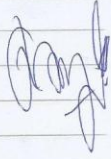
NO	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Setora
			meliputi kantor desa Prigi, kantor desa Katanggandu, kantor desa Tasikmadu, yang dihadiri oleh kepala desa masing-masing anggota masing-masing desa (KMP) dan pendamping masing-masing KMP. Setiap anggota KMP harus menyerahkan photocopy KTP untuk mengetahui profesi dari anggota KMP sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat.	
3.	1/15 7	Revisi Anggota kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tasikmadu di rumah salah satu Pemberdaya KMP desa Tasikmadu kecamatan Watulimo yang dihadiri oleh tenaga pendamping dan tim pemberdaya	Identitas anggota KMP harus sesuai dengan KTP, pada desa Tasikmadu identitas anggota KMP belum sesuai dengan identitas KTP sehingga perlu adanya revisi sehingga identitas anggota sesuai dengan KTP. Salah satu ketua KMP desa Tasikmadu belum berdomisili di desa Tasikmadu sehingga harus diganti oleh istrinya.	<i>Gomph</i>

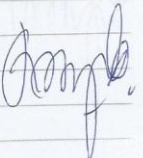
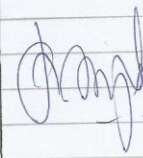
Tanggal No Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTO PIC/Sebra
		yang telah berdomisili di desa Tasikmadu - Ada salah satu anggota KMP yang sering mendapatkan bantuan sehingga diganti dengan masyarakat yang lain agar dapat berpartisipasi di program PKPT ini	
4. 2 Juli 2015	- Mengambil fotocopy identitas KTP anggota KMP Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo	- Prosedur pengumpulan identitas anggota KMP adalah menyerahkan fotocopy KTP kepada ketua KMP, setelah itu ketua KMP menyerahkan kepada tim pemberdaya, dan selanjutnya oleh tim pemberdaya menyerahkan fotocopy identitas kepada pendamping untuk direkap agar identitas anggota KMP sesuai dengan identitas di KTP - mengambil dokumentasi lokasi-lokasi yang akan dilakukan perbaikan yang meliputi jembatan penghubung antara pasar Tasikmadu dengan pantai Prigi, jalan perkampungan yang sudah tidak layak agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, Normalisasi sungai yang diwadahi hujan akan beresiko banjir dan longsor, Jalan menuju perbukitan yg sudah tidak layak karena masyarakat selain berprofesi nelayan juga berprofesi sebagai petani	
	- Pengambilan foto lokasi sebelum pencairan akan sebelum perbaikan di desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo		

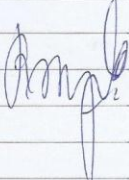
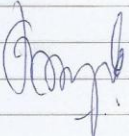
No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Setora
5	3/7 2015	- Pengecekan identitas anggota KMP	Sebelum dilaporkan kepada DKP kabupaten Trenggalek, perlu adanya pengecekan anggota KMP dengan mencocokkan antara KTP dengan data yang sudah di Setor ke pendamping KMP melalui pemberdaya. Untuk desa Prigi sudah lengkap, untuk desa Karanggandin kurang, untuk desa Tasikmadu juga kurang	
6	4/7 2015	Pembuatan Rancangan kerja kelompok (RKK)	RKK adalah Rancangan kerja kelompok, format yang sesuai dg pedoman teknis PKPT. Untuk hari ini pembentukan dan perbaikan KMP dimana harus dijelaskan secara rinci uraian kegiatan waktu pelaksanaan pengerjaan strategi dan metodologi, biaya pengerjaan produk yang dihasilkan serta gambar rencana. Dari setiap RKK harus ada TTD penanggung jawab KMP, tim pemberdaya, tenaga pendamping, tim teknis serta kuasa pengguna anggaran yaitu DKP kab. Trenggalek	
7	5/7 2015	Pembuatan RKK	Melanjutkan Rancangan kerja kelompok untuk KMP di kerjakan dan di teliti kekurangan setiap KMP dalam RKK tersebut kegiatan ini di kerjakan di tempat tinggal masing-masing	

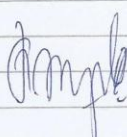
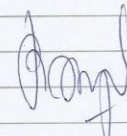
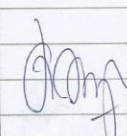
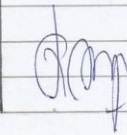
NO	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Setora
8	6/7 2015	- Penyerahan dokumen berita acara Verifikasi KMP ke DHP - Revisi Rtk	- Untuk penyerahan dokumen verifikasi KMP sudah di tanda tangani tim pendamping - Revisi Rtk terdapat kesalahan tanda tangan karena pada buku PKPT yang bertanda tangan yang di tim pemberdaya adalah tim pemberdaya bukan kepala desa, kesalahan pada hal ini karena kolom TTD tim pemberdaya ada stempel desa. - Yang bertanda tangan di Rtk adalah ketua masing-masing KMP di Desa Prigi	
9	7/7 2015	- Penyerahan Rangka kerja kelompok (Rtk) ke DHP kabupaten Trenggalek	- Penyerahan Rtk kepada DHP dari tim pendamping dilakukan masih terjadi kesalahan meliputi: 1. Desa Karanggandu terjadi kesalahan stempel Rtk pada KMP Nelayan Bersatu dan kekurangan cover pada KMP Tirta Mulyo 2. Desa Tasikmadu terjadi kesalahan karena cover dan isi Rtk tidak sesuai untuk semua KMP 3. Desa Prigi kesalahan pada tanda tangan ketua pemberdaya, kesalahan stempel, serta rangkap rekap yang kurang pada Rtk semua KMP	

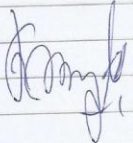
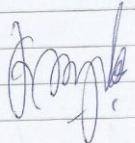
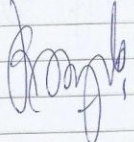
No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Sebra
10	8/ 2015 7	Penyerahan Rkk ke Dkp	- Penyerahan Rkk ke Dkp Kabupaten Trenggaleh untuk seluruh desa yang akan dimintakan TTD kepada Teknis kemudian menunggu penetapan dari DHP dalam bentuk SK - Terdapat laporan bulanan dari pendamping masing-masing desa mengenai kegiatan PKPT pada bulan Juni dan merancang laporan pada bulan Juli	
11	9/ 2015 7	Pembentukan Verivikasi KMP pada berita acara	- Pada saat dimintakan TTD oleh DHP kepada pihak Bapenas terdapat kesalahan penulisan nama salah satu nama tim teknis, sehingga dengan kesalahan tersebut harus mengulang dengan pembetulan serta terdapat pula masalah operating system windows yg perlu di edit ulang dan di barahi agar spasi tidak gandeng dengan kalimat lain	
12	11/ 2015 7	Merekap kuisioner dari masyarakat kec. Watulimo yg diberikan pendamping (Desa Prigi, Desa Tasikmadu)	- Merekap kuisioner yg berfungsi untuk mengetahui dampak yang diterima oleh masyarakat sebelum program PKPT dilaksanakan. Rekapitan kuisioner di input kedalam microsoft excel	
13	12/ 2015 7	Merekap kuisioner dari masyarakat (Desa Karanggandu)	- Melanjutkan rekapitan kuisioner untuk desa Tasikmadu Karanggandu dengan input kedalam microsoft excel	

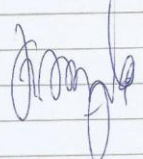
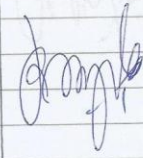
NO	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Setora
14	13/7 '15	Kordinasi dengan pihak DKP	- Pencairan dana stimulan diwakilkan tiap desa, bukan tiap KMP agar lebih efektif dan efisien - Pencairan dana dilakukan serentak untuk seluruh KMP. Apabila ada salah satu KMP belum selesai maka yang lain belum bisa menerima dana yang kedua dst - Pencairan dana melalui 3 tahap secara bertahap mulai 40%, 30%, 30% - Pembuatan NIPVP dilakukan oleh orang yang membuka rekening	
15	27/7 '15	Pengarahan dari DKP Trenggalek mengenai pencairan dana	- Untuk pencairan dana tidak setiap desa, tetapi setiap KMP agar lebih aman karena persyaratannya pencairan dana dilakukan setiap KMP bukan setiap desa - Scan file Rkt, RPKP dan laporan bulanan pendamping yang kemudian dikirim via email - Pengumpulan kontrak kerja, pemberdaya masing-masing desa	
16	28/7 '15	Pengiriman file Rkt, RPKP dan laporan bulanan pendamping ke sekretariat phpt	- Scan file disimpan berupa pdf dan setiap desa dijadikan satu folder yang kemudian dijadikan .rar. Setelah itu dikirim via email dengan alamat sekretariat pdpt@gmail.com	

Tanggal No Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Hari-hari PKM	TTO PIC/Setor
7 3/8 15	- Mengambil SK ke Dkp Trenggalek - Mengurus NPWP di kantor pajak	- Mengambil SK ke Dkp Trenggalek untuk persyaratan mengurus NPWP sebelum pencairan dana - Seluruh ketua KMP desa Prigi datang ke kantor pajak untuk mengurus NPWP - Syarat mengurus NPWP yaitu mengisi form formulir biodata sesuai dengan identitas KTP serta menyertakan fotocopy KTP dan SK dari Dkp - Mendapat nomer NPWP yang masih berupa scan, untuk ID NPWP yang asli akan dikirim ke alamat ketua KMP masing-masing yang membutuhkan waktu selama 3 minggu	
8 5/8 15	- Mengurus NPWP dan membuka Rekening untuk KMP	- Mengurus NPWP untuk desa Karangandu dan Tasikmadu yg prosedur dan persyaratannya sama dengan desa Prigi - Membuka rekening untuk tiga desa, yaitu Tasikmadu, Prigi, dan Karangandu setelah mengurus NPWP - Persyaratan membuka rekening yaitu membawa KTP Asli, setelah rekening harus di tanda tangani oleh ketua dan bendahara KMP - Pembuatan rekening untuk 3 desa totalnya 13 rekening, masing-masing KMP 1 rekening	

No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTO PIC/Sebra
19.	6/8 '15	- Penyelesaian pembuatan rekening	- Untuk pembuatan rekening pada hari sebelumnya kurang 2 desa yaitu Tasikmadu 2 KMP dan Perungandu 1 KMP	
20	10/8 '15	- Pengarahan dari DHP setelah pihak DHP report di Bogor	- Pada tanggal 5-7 Agustus 2015 Perwakilan DHP trenggalek mengikutsertakan Bimtek di Bogor untuk membahas kelanjutan PKPT dengan hasil sebagai berikut: - Untuk pembuatan KMP seharusnya 3 dalam setiap kawasan untuk wilayah Trenggalek terlalu banyak dalam pembentukan KMP nanti dikhawatirkan kesulitan dalam pembuatan laporan - Untuk KMP bina usaha pencairan nya masih ditanyakan, karena pembelian alat usaha harus kontan dalam pembayarannya - Dalam PKPT harus dicantumkan tim perencanaan, tim pelaksana, tim pengawas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta membuat struktur organisasi - Penanggung jawab KMP seharusnya Kepala desa - Pada waktu pelaksanaan program untuk dokumentasi berupa bentuk foto/video - Pencairan dana 3 tahap, yaitu 40%, 30%, 30% dan pemotongan pajak dilakukan setiap pencairan dana - Setiap KMP harus beranggotakan 7 orang	

No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TTD PIC/Sebra
			- Digambar perencanaan ditambahi mengetahui serta tanda tangan penanggung jawab KMP.	
21	13 Agustus 2015	Pengarahan dari DKP mengenai RAB	- Pada RAB seharusnya yg dicantumkan PPN bukan PPH, pemotongan pajak yaitu hanya dana yg terpakai untuk pembelangan saja sedangkan sisanya tidak terkena pajak / terpotong pajak - pada RKK ditambahi struktur, tugas dan kewajiban anggota - Untuk survey barang di beri bukti Stempel toko dan foto serta spesifikasi kasi barang yg telah di survey - Untuk survey sebaiknya dilakukan minimal 2 toko sehingga bisa dijadikan pertimbangan	
22	14/8 15	Perbaikan RKK mengenai RAB	- Perbaikan RAB sesuai dengan arahan DKP - Membuat struktur dan tugas serta kewajiban dari tim perencanaan pelaksana dan pengawas dari masing-masing KMP - Setiap RAB dicopy 4x untuk dimintakan tanda tangan ke ketua KMP dan kepala desa	
23	16/8 15	Meminta tanda tangan RKK	- Meminta tanda tangan RKK ke ketua KMP dan kepala desa Tasikmadu - Yang di tanda tangani RAB untuk syarat pencarian dana	
24	19/8 15	Melengkapi RKK des Tasikmadu dan Prigi tentang survey harga barang	- Mengisi form untuk survey harga barang dari tiga toko, yaitu Agroba, kraton, Prigi, Alvin	

No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Harian PKM	TID PIC/Setora
			- Dari Survey barang tiga toko ini harga masing-masing toko ditulis di form dan memiliki harga barang yg paling murah - pengisian form survey harga ini masih desa Tasikmadu dan desa Prigi karena untuk desa Karanggandu belum survey barang - Setiap form survey harga bahan di tanda tangani oleh tim perencana dari setiap kmp	
25	20/8 15	Melengkapi Rkrk desa Karanggandu mengenai survey harga barang dan RAB	- Meminta Tanda tangan lurah Karanggandu untuk RAB yg sudah di perbaiki - Survey harga barang dengan mengaan pada arsip yang telah dimiliki oleh desa untuk paving ke U.P. Panji Putra, dan untuk perlengkapan lain ke toko Agreba klaton prigi, lestari, Danas Sahiti Group. - Untuk ketentuan sama seperti Desa Tasikmadu dan Prigi	
26	21/8 15	Penyerahan Rkrk ke Dkrp Trenggalek	- Rkrk hanya di kerahkan ke Dkrp tanpa di Acc oleh bu hartini karena sedang ke luar kota	
27	25/8 15	Pengarahan dari Dkrp Trenggalek	- Untuk membahas Rkrk dan Matik - Untuk Rkrk desa prigi dan Tasikmadu RABnya tidak disertai volume dan total anggaran total - Untuk desa Prigi dan Tasikmadu RABnya tidak sama dengan matik sehingga memerlukan perbaikan	

No	Tanggal Bulan/tahun	Kegiatan	Catatan Hari-hari PKM	TTD PIC/Sebra
		- Perbaiki RAB mengenai volume dan total anggaran biaya	- Penambahan volume (tinggi) pada RAB dan penyesuaian total anggaran biaya dengan matrik - Pembetulan RPKP yang disesuaikan dengan RRM-Des untuk desa Prigi dan Tasikmadu	
28	26/18	Pengiriman RAB dan RPKP ke DHP Trenggaleh	- Sebelum ke DHP meminta tanda tangan ketua KMP dan lurah untuk RAB yg sudah diperbaiki - Penyesuaian RAB dengan matrik, dan setelah itu dikirim via e-mail - Pengiriman surat pengalaman dari DHP ke pendamping untuk diminta menandatangani ke ketua KMP setiap desa	
29	27/18	Meminta tanda tangan ketua KMP untuk desa Karanganyar dan Tasikmadu	- Meminta tanda tangan ketua KMP untuk desa Karanganyar dan Tasikmadu mengenai surat perjanjian antara pihak DHP dengan Ketua KMP, untuk desa Prigi diserahkan tim pemberdayaan untuk meminta tanda tangan ke ketua KMP desa prigi	
30	31/18	Pengiriman Surat Perjanjian antara DHP bersama KMP, diserahkan ke DHP Trenggaleh	- Kegiatan hari ini adalah pengiriman Surat perjanjian KMP ke DHP. Surat perjanjian tersebut sebagai syarat pencairan dana. Dikarenakan Bu Hartini berada di luar kota, berkas hanya diletakkan di ruangan Bu Hartini - Selanjutnya menunggu pencairan dana untuk pelaksanaan pembangunan	

Kelompok tempat



Kelompok tempat

Lampiran 2. SK Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mita Bahari III Lt. II Telp. (021) 3513211 Ext. 6201, 6203,
Fax. (021) 3520357, 3522560, 3522040 Jakarta

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
NOMOR 02/PER-DJKP3K/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH
TAHUN 2015**

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir dari risiko bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015 ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 April 2015

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL,
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas


Achmad Satiri

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan



Sosialisasi Program Kawasan Pesisir Tangguh



Kordinasi dengan pihak DKP Kabupaten Trenggalek



Kegiatan Pembuatan NPWP untuk KMP penerima dana Stimulan



Penandatanganan surat perjanjian antara KMP dengan Pihak DKP